

ANALISIS PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING EKONOMI DI PROVINSI RIAU

ANALYSIS OF GROWING AND THE COMPETITIVENESS OF ECONOMY IN RIAU PROVINCE

Hermaleni¹, Syaiful Hadi², Didi Muwardi²

Departement of Agribusiness, Faculty of Agriculture, University of Riau

Jln. HR. Subrantas KM 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28294

Email : hermaleni@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study aims to analyze the rate growth and competitiveness of each province in Indonesia by economic sectors especially in Riau. The methods of analysis used in this study is *Shift Share*. The results showed that the West Sulawesi has a slow growth rate in agriculture, livestock, forestry and fisheries but is able competitive well, while the sector of electricity, gas and water supply has a rapid growth rate and afford competitive properly. Gorontalo has a slow growth rate but is able competitive well in the mining and quarrying sectors. West Papua growth rate is slow but capable of competitive well in the manufacturing sector, while the services sector has a rapid growth rate and afford competitive properly. Papua has a rapid growth rate and is able competitive well in the building sector and the financial sector, leasing and business services. Southeast Sulawesi has a rapid growth rate and is able competitive well in the trade, hotels and restaurants. DKI Jakarta has a rapid growth rate and is able competitive well in the transport and communications sector. The economic sectors that have rapid growth rate and have high competitiveness in Riau are: the building sector; trading, hotel and restaurant sector; transportation and communication; financial, rental and service company; and services sector. The slow-growing economic sectors and unable to competitive well are: agriculture, livestock, forestry and fishery, and also mining and quarrying.

Keywords : Economic Growth, Competitiveness, *Shift Share*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan

1. Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau
2. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Riau

kesejahteraan. Pada pembangunan ekonomi di daerah, tujuan pembangunan itu sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, proses pembangunan di daerah jauh lebih spesifik (Tambunan, 2001).

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Provinsi Riau dengan posisi yang strategis, dalam koridor ekonomi Sumatera, terletak pada jalur perdagangan internasional (Selat Malaka), berhadapan dengan negara Singapura dan Malaysia. Kawasan ini merupakan kutub pertumbuhan ekonomi di Asia yang masuk dalam rencana strategi nasional dan global seperti kerja sama *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) dan *Asia Pasific Economic* (APEC) sehingga memberikan pengaruh langsung terhadap segala aspek pembangunan Provinsi Riau.

Pembangunan Provinsi Riau yang didukung posisi yang strategis dan sumber daya alam yang besar, mempunyai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus *specific, measurable, achievable, realistic* dan *timely* (SMART). Sehingga hasil pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah.

Tujuan penelitian ini adalah :

(1) Menganalisis tingkat pertumbuhan dan daya saing masing-masing provinsi di Indonesia. (2) Menganalisis tingkat pertumbuhan dan daya saing masing-

masing provinsi di Indonesia menurut sektor ekonomi di Indonesia.

(3) Menganalisis tingkat pertumbuhan dan daya saing masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Riau.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain BPS Provinsi Riau, instansi atau lembaga lain di Provinsi Riau serta jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dibutuhkan dari data sekunder merupakan data *time series* tahun 2008 dan 2012. Keseluruhan data yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini meliputi : (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 33 provinsi di Indonesia, (2) Produk Domestik Bruto (PDB).

Analisis Data

Untuk menganalisis pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi di Provinsi Riau menggunakan metode *shift share*. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 33 provinsi pada tahun 2008 dan 2012 dengan harga konstan 2000.

Tahap-tahap perhitungan analisis *shift share* adalah sebagai berikut :

1. Rumus Perubahan PDRB adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan PDRB sektor *i* pada provinsi *j* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\Delta Y_{ij} = Y'_{ij} - Y_{ij}$$

Persentase perubahan PDRB adalah sebagai berikut :

$$\% \Delta Y_{ij} = \frac{(Y'_{ij} - Y_{ij})}{Y_{ij}} \times 100\%$$

Dimana :

ΔY_{ij} : Perubahan PDRB sektor *i* pada provinsi *j*

$\% \Delta Y_{ij}$: Persentase perubahan PDRB sektor *i* pada provinsi *j*

Y'_{ij} : PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun akhir analisis

Y_{ij} : PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun dasar analisis

2. Menghitung Rasio Indikator Kegiatan Ekonomi

Rasio indikator kegiatan ekonomi digunakan untuk melihat perbandingan PDRB sektor ekonomi di Provinsi Riau. Rasio PDRB terbagi atas r_i , R_i dan R_a .

a. r_i

$$r_i = \frac{Y'_{ij}}{Y_{ij}}$$

Dimana :

Y'_{ij} : PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun akhir analisis

Y_{ij} : PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun dasar analisis

R_i : Perbandingan antara PDRB dari sektor i provinsi j pada tahun akhir analisis dengan PDRB sektor i provinsi j pada tahun awal analisis

b. R_i

$$R_i = \frac{Y'_i}{Y_i}$$

Dimana :

Y'_i : Jumlah PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun akhir analisis

Y_i : Jumlah PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun dasar analisis

R_i : Perbandingan antara jumlah PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun akhir analisis dengan jumlah PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun dasar analisis

c. R_a

$$R_a = \frac{Y'}{Y}$$

Dimana :

Y' : Jumlah PDRB dari semua sektor ekonomi pada setiap provinsi pada tahun akhir analisis

Y : Jumlah PDRB dari semua sektor ekonomi pada setiap provinsi pada tahun dasar analisis

R_a : Perbandingan Jumlah PDRB dari semua sektor ekonomi pada setiap provinsi pada tahun akhir analisis dengan Jumlah PDRB dari semua

sektor ekonomi pada setiap provinsi pada tahun dasar analisis

3. Menghitung Komponen Pertumbuhan Wilayah

Komponen pertumbuhan wilayah terdiri atas komponen pertumbuhan nasional (PN), Komponen pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).

a. Komponen Pertumbuhan Nasional (PN)

$$PN_{ij} = Y_{ij} \times (R_a - 1)$$

Dimana :

PN_{ij} = Komponen Pertumbuhan Nasional sektor i pada provinsi j

Y_{ij} = PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun dasar analisis

R_a = Rasio PDRB Provinsi

b. Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP)

$$PP_{ij} = Y_{ij} \times (R_i - R_a)$$

Dimana :

PP_{ij} = Komponen Pertumbuhan Proporsional sektor i pada provinsi j

Y_{ij} = PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun dasar analisis

R_i = Rasio PDRB Provinsi untuk sektor i

R_a = Rasio PDRB Provinsi

Apabila $PP_{ij} < 0$, menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah ke j pertumbuhannya lambat, sedangkan apabila $PP_{ij} > 0$ menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah ke j pertumbuhannya cepat.

c. Komponen Pangsa Wilayah (PPW)

$$PPW_{ij} = Y_{ij} \times (r_i - R_i)$$

Dimana :

PPW_{ij} = Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah sektor i pada provinsi j

Y_{ij} = PDRB dari sektor i pada provinsi j pada tahun dasar analisis

r_i = Rasio PDRB sektor i pada wilayah j

R_i = Rasio PDRB Provinsi untuk sektor i

Apabila $PPW_{ij} > 0$, maka berarti bahwa wilayah ke j mempunyai daya saing yang baik apabila dibandingkan

dengan wilayah lainnya untuk sektor ke i, atau dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut mempunyai *comparative advantage* untuk sektor ke i bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sedangkan apabila $PPW_{ij} < 0$, maka berarti bahwa sektor i pada wilayah ke j tidak dapat bersaing dengan baik apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

4. Adapun Perubahan dalam PDRB Sektor i pada Provinsi j dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Y_{ij} = PR_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij}$$

$$\Delta Y'_{ij} = Y'_{ij} - Y_{ij}$$

Rumus ketiga komponen pertumbuhan wilayah adalah:

$$PN_{ij} = Y_{ij} (R_a - 1)$$

$$PP_{ij} = Y_{ij} (R_i - R_a)$$

$$PPW_{ij} = Y_{ij} (r_i - R_i)$$

Apabila persamaan (1), (6), (7) dan (8) didistribusikan ke persamaan (9), maka didapatkan:

$$\Delta Y_{ij} = PN_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij}$$

$$Y'_{ij} - Y_{ij} = Y_{ij} (R_a - 1) + Y_{ij} (R_i - R_a) + Y_{ij} (r_i - R_i)$$

Persentase ketiga pertumbuhan wilayah dapat dirumuskan:

$$\%PN_{ij} = R_a - 1$$

$$\%PP_{ij} = R_i - R_a$$

$$\%PPW_{ij} = r_i - R_i$$

Atau

$$\%PN_{ij} = (PN_{ij} / Y_{ij}) * 100\%$$

$$\%PP_{ij} = (PP_{ij} / Y_{ij}) * 100\%$$

$$\%PPW_{ij} = (PPW_{ij} / Y_{ij}) * 100\%$$

Menghitung Pergeseran Bersih

Apabila komponen pertumbuhan proposional dan pertumbuhan pangsa wilayah dijumlahkan, maka akan diperoleh pergeseran bersih yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor perekonomian. Pergeseran bersih sektor i pada wilayah j dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PB_{ij} = PP_{ij} + PPW_{ij}$$

Dimana :

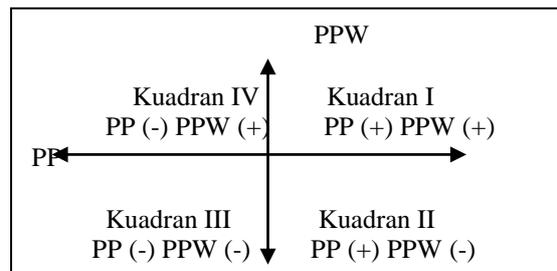
PB_{ij} : Pergeseran bersih sektor i pada provinsi j

PP_{ij} : Pertumbuhan Proporsional sektor i pada provinsi j

PPW_{ij} : Pertumbuhan Pangsa Wilayah sektor i pada provinsi j

Mengevaluasi Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian

Profil pertumbuhan sektor perekonomian digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor perekonomian di wilayah yang bersangkutan pada kurun waktu yang ditentukan dengan cara mengekspresikan persen komponen pertumbuhan proporsional (PP_{ij}) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW_{ij}). Pada sumbu horizontal terdapat PP sebagai absis sedangkan pada sumbu vertikal terdapat PPW sebagai ordinat.



Gambar 4 . Profil Pertumbuhan PDRB (Budiharsono ,2001)

Kuadran-kuadran pada gambar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kuadran I menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki pertumbuhan yang cepat. Selain itu, sektor tersebut juga dapat bersaing dengan sektor-sektor perekonomian dari wilayah lain. Karena pertumbuhan sektor-sektor ekonominya tergolong dalam pertumbuhan yang cepat, maka wilayah yang bersangkutan juga merupakan wilayah yang progresif (maju).
- Kuadran II menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki pertumbuhan yang cepat, tetapi sektor tersebut tidak mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari daerah lain.

- c. Kuadran III menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki pertumbuhan sektor perekonomian yang lambat dan tidak mampu bersaing dengan wilayah lain. Jadi wilayah tersebut tergolong pada wilayah yang memiliki pertumbuhan yang lambat.
- d. Kuadran IV menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian pada suatu wilayah memiliki pertumbuhan yang lambat, tetapi sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tingkat pertumbuhan dan daya saing masing-masing provinsi di Indonesia

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kuadran I, adalah: Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Pada Kuadran I ini menunjukkan bahwa $PP.j$, $PPW.j$ dan $PB.j$ bernilai positif. Hal ini berarti provinsi-provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP.j > 0$) dan mempunyai daya saing yang baik ($PPW.j > 0$). Hal ini juga menunjukkan bahwa pergeseran bersih bernilai positif ($PB.j \geq 0$) yang berarti provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi maju (progresif).

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kuadran II adalah: Provinsi Sumatera Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada Kuadran II ini menunjukkan bahwa $PP.j$ bernilai positif dan $PPW.j$ bernilai negatif. Pada Kuadran II ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP.j > 0$), tetapi tidak mempunyai daya saing yang baik ($PPW.j < 0$). Provinsi DKI Jakarta dan Bali memiliki nilai pergeseran bersih positif ($PB.j \geq 0$), artinya provinsi tersebut

merupakan provinsi progresif (maju). Namun demikian ada beberapa provinsi yang nilai pergeseran bersihnya negatif ($PB.j < 0$), yaitu Provinsi Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur artinya provinsi-provinsi tersebut terbelakang.

Provinsi-provinsi yang berada pada Kuadran III adalah: Provinsi Aceh, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Pada Kuadran III ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi tersebut pertumbuhannya lambat ($PP.j < 0$) dan tidak mempunyai daya saing yang baik ($PPW.j < 0$). Hal ini menunjukkan bahwa semua provinsi yang berada pada kuadran III nilai pergeseran bersihnya adalah negatif ($PB.j < 0$) yang artinya provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi terbelakang.

Provinsi-provinsi yang termasuk pada Kuadran IV adalah: Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat.

Pada Kuadran IV menunjukkan bahwa provinsi-provinsi tersebut pertumbuhannya lambat ($PP.j < 0$), tetapi mempunyai daya saing yang baik ($PPW.j > 0$). Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat memiliki nilai pergeseran bersihnya positif ($PB.j \geq 0$), artinya provinsi-provinsi tersebut termasuk dalam kelompok provinsi maju (progresif). Namun demikian ada beberapa provinsi yang nilai pergeseran bersih negatif ($PB.j < 0$), yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan, artinya provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi terbelakang.

Analisis Tingkat Pertumbuhan dan Daya Saing Masing-Masing Provinsi di Indonesia Menurut Sektor Ekonomi di Indonesia.

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran III adalah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat.

Pada kuadran III ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya lambat ($PP_{ij} < 0$) dan tidak dapat bersaing dengan baik ($PPW_{ij} < 0$) apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua provinsi yang berada pada kuadran III ini nilai pergeseran bersihnya adalah negatif ($PB_{ij} < 0$) maka pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran IV adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Pada kuadran IV ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya lambat ($PP_{ij} < 0$) tetapi daya saing provinsi-provinsi untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tersebut baik ($PPW_{ij} < 0$) jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada kuadran IV provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} \geq 0$) adalah Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo

dan Sulawesi Barat yang berarti pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk kedalam kelompok progresif (maju) sedangkan provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} < 0$) adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara dan Papua yang berarti pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran III adalah Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua. Pada kuadran III ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya lambat ($PP_{ij} < 0$) dan tidak dapat bersaing dengan baik ($PPW_{ij} < 0$) apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua provinsi yang berada pada kuadran III ini nilai pergeseran bersihnya adalah negatif ($PB_{ij} < 0$) maka pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran IV adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi

Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Pada kuadran IV ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya lambat ($PPij < 0$) tetapi daya saing provinsi-provinsi untuk sektor pertambangan dan penggalian tersebut baik ($PPWij < 0$) jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada kuadran IV provinsi yang memiliki nilai ($PBij \geq 0$) adalah Provinsi Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku yang berarti pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian pada provinsi-provinsi tersebut termasuk kedalam kelompok progresif (maju) sedangkan provinsi yang memiliki nilai ($PBij < 0$) adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Barat yang berarti pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Sektor Industri Pengolahan

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran III adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pada kuadran III ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya lambat ($PPij < 0$) dan tidak dapat bersaing dengan baik ($PPWij < 0$) apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua provinsi yang berada pada kuadran III ini nilai pergeseran bersihnya adalah negatif ($PBij$

< 0) maka pertumbuhan sektor industri pengolahan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran IV adalah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pada kuadran IV ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya lambat ($PPij < 0$) tetapi daya saing provinsi - provinsi untuk sektor industri pengolahan tersebut baik ($PPWij < 0$) jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada kuadran IV provinsi yang memiliki nilai ($PBij \geq 0$) adalah Provinsi Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat yang berarti pertumbuhan sektor industri pengolahan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk kedalam kelompok maju (progresif) sedangkan provinsi yang memiliki nilai ($PBij < 0$) adalah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua yang berarti pertumbuhan sektor industri pengolahan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran I adalah Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Pada kuadran I ini menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) dan dapat bersaing dengan baik ($PPW_{ij} > 0$) apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua provinsi yang berada pada kuadran I ini nilai pergeseran bersihnya adalah positif ($PB_{ij} \geq 0$) maka pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih pada provinsi-provinsi tersebut termasuk progresif (maju).

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran II adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Pada kuadran II ini menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) tetapi daya saing provinsi-provinsi untuk sektor listrik, gas dan air bersih tersebut dibandingkan dengan provinsi lainnya tidak baik ($PPW_{ij} < 0$). Pada kuadran II provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} \geq 0$) adalah Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Papua yang berarti pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih pada provinsi-provinsi tersebut termasuk kedalam kelompok progresif (maju) sedangkan provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} < 0$) adalah Provinsi Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku dan Maluku Utara yang berarti pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih pada provinsi - provinsi tersebut termasuk lambat.

Sektor Bangunan

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kuadran I adalah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat,

Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pada kuadran I ini menunjukkan bahwa sektor bangunan yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) dan dapat bersaing dengan baik ($PPW_{ij} > 0$) apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua provinsi yang berada pada kuadran I ini nilai pergeseran bersihnya adalah positif ($PB_{ij} \geq 0$) maka pertumbuhan sektor bangunan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk progresif (maju).

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran II adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pada kuadran II ini menunjukkan bahwa sektor bangunan yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) tetapi daya saing provinsi-provinsi untuk sektor bangunan tersebut dibandingkan dengan provinsi lainnya tidak baik ($PPW_{ij} < 0$). Pada kuadran II provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} \geq 0$) adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat yang berarti pertumbuhan sektor bangunan pada provinsi - provinsi tersebut termasuk kedalam kelompok progresif (maju) sedangkan provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} < 0$) adalah Provinsi Aceh, Lampung dan Nusa Tenggara Timur yang berarti pertumbuhan sektor bangunan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran I adalah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua. Pada kuadran I ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) dan dapat bersaing dengan baik ($PPW_{ij} > 0$) apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua provinsi yang berada pada kuadran I ini nilai pergeseran bersihnya adalah positif ($PB_{ij} \geq 0$) maka pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada provinsi-provinsi tersebut termasuk progresif (maju).

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran II adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat. Pada kuadran II ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) tetapi daya saing provinsi-provinsi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut dibandingkan dengan provinsi lainnya tidak baik ($PPW_{ij} < 0$). Pada kuadran II provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} \geq 0$) adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Barat yang

berarti pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada provinsi-provinsi tersebut termasuk kedalam kelompok progresif (maju) sedangkan provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} < 0$) adalah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, DI Yogyakarta dan Kalimantan Barat yang berarti pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran I adalah Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat. Pada kuadran I ini menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) dan dapat bersaing dengan baik ($PPW_{ij} > 0$) apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua provinsi yang berada pada kuadran I ini nilai pergeseran bersihnya adalah positif ($PB_{ij} \geq 0$) maka pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi pada provinsi-provinsi tersebut termasuk progresif (maju).

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran II adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara. Pada kuadran II ini menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) tetapi daya saing provinsi - provinsi untuk sektor pengangkutan dan komunikasi tersebut

dibandingkan dengan provinsi lainnya tidak baik ($PPW_{ij} < 0$). Pada kuadran II provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} \geq 0$) adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara yang berarti pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi pada provinsi-provinsi tersebut termasuk kedalam kelompok progresif (maju) sedangkan provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} < 0$) adalah Provinsi Jambi, Jawa Barat dan Kalimantan Tengah yang berarti pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran I adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pada kuadran I ini menunjukkan bahwa sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) dan dapat bersaing dengan baik ($PPW_{ij} > 0$) apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua provinsi yang berada pada kuadran I ini nilai pergeseran bersihnya adalah positif ($PB_{ij} \geq 0$) maka pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk progresif (maju).

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran II adalah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat dan Maluku. Pada kuadran II ini menunjukkan bahwa sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) tetapi daya saing provinsi-provinsi untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tersebut dibandingkan dengan provinsi lainnya tidak baik ($PPW_{ij} < 0$). Pada kuadran II provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} \geq 0$) adalah Provinsi Kepulauan Riau, Bali, dan Kalimantan Barat yang berarti pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk kedalam kelompok progresif (maju) sedangkan provinsi yang memiliki nilai ($PB_{ij} < 0$) adalah Provinsi Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Maluku yang berarti pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Sektor Jasa-jasa

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kudaran I adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pada kuadran I ini menunjukkan bahwa sektor jasa - jasa yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) dan dapat bersaing dengan baik ($PPW_{ij} > 0$) apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua provinsi yang berada pada kuadran

I ini nilai pergeseran bersihnya adalah positif ($P_{Bij} \geq 0$) maka pertumbuhan sektor jasa-jasa pada provinsi-provinsi tersebut termasuk progresif (maju).

Provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kuaran II adalah Provinsi Aceh, Jambi, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat. Pada kuaran II ini menunjukkan bahwa sektor jasa-jasa yang berada di provinsi tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) tetapi daya saing provinsi-provinsi untuk sektor jasa-jasa tersebut dibandingkan dengan provinsi lainnya tidak baik ($PPW_{ij} < 0$). Pada kuaran II provinsi yang memiliki nilai ($P_{Bij} \geq 0$) adalah Provinsi DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah yang berarti pertumbuhan sektor jasa-jasa pada provinsi-provinsi tersebut termasuk kedalam kelompok progresif (maju) sedangkan provinsi yang memiliki nilai ($P_{Bij} < 0$) adalah Provinsi Aceh, Jambi, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat yang berarti pertumbuhan sektor jasa-jasa pada provinsi-provinsi tersebut termasuk lambat.

Analisis tingkat pertumbuhan dan daya saing masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Riau.

Sektor ekonomi yang termasuk dalam Kuaran I adalah: sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Kuaran I ini menunjukkan bahwa PP_{ij} , PPW_{ij} dan P_{Bij} bernilai positif. Hal ini berarti sektor-sektor tersebut pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$) dan mempunyai daya saing yang baik ($PPW_{ij} > 0$) di Provinsi Riau.. Nilai pergeseran bersih pada sektor-sektor ini bernilai positif ($P_{B.j} > 0$) artinya

pertumbuhan sektor ekonomi tersebut termasuk ke dalam kelompok progresif (maju).

Sektor ekonomi yang termasuk dalam Kuaran II adalah: sektor listrik, gas dan air bersih. Kuaran II ini menunjukkan bahwa PP_{ij} bernilai positif dan PPW_{ij} bernilai negatif artinya pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$), tetapi tidak mempunyai daya saing yang baik ($PPW_{ij} < 0$) di Provinsi Riau. Pergeseran bersih bernilai negatif ($P_{Bij} < 0$), artinya pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih lambat.

Sektor ekonomi yang termasuk dalam Kuaran II adalah: sektor listrik, gas dan air bersih. Kuaran II ini menunjukkan bahwa PP_{ij} bernilai positif dan PPW_{ij} bernilai negatif artinya pertumbuhannya cepat ($PP_{ij} > 0$), tetapi tidak mempunyai daya saing yang baik ($PPW_{ij} < 0$) di Provinsi Riau. Pergeseran bersih bernilai negatif ($P_{Bij} < 0$), artinya pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih lambat.

Sektor ekonomi yang berada pada Kuaran III adalah: sektor pertanian, perternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Kuaran III ini menunjukkan bahwa pertumbuhannya lambat ($PP_{ij} < 0$) dan tidak mempunyai daya saing yang baik ($PPW_{ij} < 0$) di Provinsi Riau. Nilai pergeseran bersih negatif ($P_{Bij} < 0$) artinya pertumbuhan sektor pertanian, perternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian lambat.

Sektor ekonomi yang termasuk pada Kuaran IV adalah: sektor industri pengolahan. Kuaran IV menunjukkan bahwa pertumbuhannya lambat ($PP_{ij} < 0$), tetapi mempunyai daya saing yang baik ($PPW_{ij} > 0$) di Provinsi Riau. Pergeseran bersih bernilai negatif ($P_{Bij} < 0$), artinya pertumbuhan sektor industri pengolahan lambat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya saing masing-masing provinsi menunjukkan potensi yang berbeda-beda. Provinsi yang pertumbuhan cepat tetapi tidak mampu berdaya saing dengan baik terdapat 5 Provinsi. Provinsi yang pertumbuhannya lambat dan tidak mampu berdaya saing dengan baik terdapat 6 Provinsi. Provinsi yang pertumbuhannya lambat tetapi mampu berdaya saing dengan baik terdapat 13 Provinsi.
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya saing menurut sektor ekonomi 33 provinsi di Indonesia adalah Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan berada pada kuadran III dan IV. Terdapat 15 Provinsi yang menunjukkan pertumbuhannya lambat dan tidak dapat bersaing dengan baik (Kuadran III). Terdapat 19 Provinsi yang pertumbuhannya lambat tetapi mampu berdaya saing dengan baik (Kuadran IV). Sektor pertambangan dan penggalian berada pada kuadran III dan IV. Terdapat 11 Provinsi yang menunjukkan pertumbuhannya lambat dan tidak dapat bersaing dengan baik (Kuadran III). Terdapat 21 Provinsi yang pertumbuhannya lambat tetapi mampu berdaya saing dengan baik (Kuadran IV). Sektor industri pengolahan berada pada kuadran III dan IV. Terdapat 11 Provinsi yang menunjukkan pertumbuhannya lambat dan tidak dapat bersaing dengan baik (Kuadran III). Terdapat 22 Provinsi yang pertumbuhannya lambat tetapi mampu berdaya saing dengan baik (Kuadran IV). Sektor listrik, gas dan air bersih berada pada kuadran I dan II. Terdapat 22 Provinsi yang menunjukkan pertumbuhannya cepat dan dapat bersaing dengan baik (Kuadran I). Terdapat 11 Provinsi yang pertumbuhannya cepat tetapi tidak mampu berdaya saing dengan baik (Kuadran II). Sektor bangunan berada pada kuadran I dan II. Terdapat 19 Provinsi yang menunjukkan pertumbuhannya cepat dan dapat bersaing dengan baik (Kuadran I). Terdapat 14 Provinsi yang pertumbuhannya cepat tetapi tidak mampu berdaya saing dengan baik (Kuadran II). Sektor perdagangan, hotel dan restoran berada pada kuadran I dan II. Terdapat 15 Provinsi yang menunjukkan pertumbuhannya cepat dan dapat bersaing dengan baik (Kuadran I). Terdapat 19 Provinsi yang pertumbuhannya cepat tetapi tidak mampu berdaya saing dengan baik (Kuadran II). Sektor pengangkutan dan komunikasi berada pada kuadran I dan II. Terdapat 10 Provinsi yang menunjukkan pertumbuhannya cepat dan dapat bersaing dengan baik (Kuadran I). Terdapat 22 Provinsi yang pertumbuhannya cepat tetapi tidak mampu berdaya saing dengan baik (Kuadran II). Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berada pada kuadran I dan II. Terdapat 27 Provinsi yang menunjukkan pertumbuhannya cepat dan dapat bersaing dengan baik (Kuadran I). Terdapat 6 Provinsi yang pertumbuhannya cepat tetapi tidak mampu berdaya saing dengan baik (Kuadran II). Sektor jasa-jasa perusahaan berada pada kuadran I dan II. Terdapat 23 Provinsi yang menunjukkan pertumbuhannya cepat dan dapat bersaing dengan baik (Kuadran I). Terdapat 10 Provinsi yang pertumbuhannya cepat tetapi tidak mampu berdaya saing dengan baik (Kuadran II).
3. Sektor ekonomi yang pertumbuhan cepat dan mempunyai daya saing yang baik di Provinsi Riau adalah sektor

bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Sektor ekonomi yang pertumbuhan cepat tetapi tidak mampu berdaya saing dengan baik adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor ekonomi yang pertumbuhannya lambat dan tidak mampu berdaya saing dengan baik adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ekonomi yang pertumbuhannya lambat tetapi mampu berdaya saing dengan baik adalah sektor industri pengolahan.

Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan sektor yang berada pada kuadran IV yaitu sektor industri pengolahan karena sektor ini mampu berdaya saing namun pertumbuhannya masih lambat.
2. Bagi investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Riau diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam memperhatikan sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan serta prioritas pembangunan masing-masing sektor di Provinsi Riau.
3. Dalam mengupayakan pembangunan perekonomian di Provinsi Riau, pemerintah daerah sebaiknya bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengembangkan sektor ekonomi potensial yang tersedia di Provinsi Riau.
4. Pemerintah Provinsi Riau perlu mengupayakan pengembangan pada sektor-sektor lainnya yang memiliki kemajuan namun mendapatkan tekanan, memiliki potensi untuk berkembang, termasuk yang masih tertinggal sehingga memiliki daya saing untuk mendorong peningkatan

kontribusi terhadap PDRB Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono, S. 2001. **Teknik Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan**. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Tambunan, Tulus. 2001. **Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris**. Jakarta, Ghalia Indonesia.